

# IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN

**Rio Setiawan<sup>1</sup>, Zaili Rusli<sup>2</sup>, Mayarni<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: riosiberakun@gmail.com<sup>1</sup>, zailirusliwdzr@yahoo.co.id<sup>2</sup>, mayarni@lecturer.unri.ac.id<sup>3</sup>

**Abstrak:** Implementasi Program Ketahanan Pangan yang baik dari masyarakat merupakan tujuan utama pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan peningkatan sumber ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui kebijakan ketahanan pangan pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sehingga memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Implementasi dan faktor-faktor penghambat dalam Program Ketahanan Pangan Di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Tanaman Padi Di Kecamatan Benai masih belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan komunikasi antara implementor dengan pembuat kebijakan masih belum dirasakan oleh semua petani padi, kemudian Sumber daya yang dimiliki baik berupa sumber daya manusia dan sumber daya pendukung berupa fasilitas juga belum terpenuhi dengan baik, selanjutnya Disposisi/sikap pelaksana juga belum maksimal dan lambatnya proses penurunan disposisi sebuah kebijakan, terakhir yaitu struktur birokrasi yang membuat banyaknya tahapan yang harus dilalui hingga sampai ke tahap pelaksanaan dilapangan oleh petani. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan ketahanan pangan tanaman padi di kecamatan benai yaitu kurangnya fasilitas Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai, kemudian juga kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk mendukung terlaksananya kebijakan ketahanan pangan tanaman padi di Kecamatan Benai seperti pelaksanaa kegiatan baik penyuluhan, pertemuan dalam penyusunan program maupun pembuatan percontohan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Ketahanan Pangan.

## PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi tugas penting kementerian pertanian. Indonesia memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan terbesar. Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2012, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah “ kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan”. Dengan demikian suatu wilayah dikatakan berhasil

dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat.

Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Basis pembangunan perdesaan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah

kerawanan pangan dan kemiskinan di pedesaan adalah melalui Program Mandiri Pangan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari kehari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Program Mandiri Pangan dilaksanakan selama 4 (empat) tahap berturut-turut melalui 4 tahapan pelaksanaan yaitu: tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Tiap tahapan memuat berbagai macam kegiatan dengan waktu pelaksanaan tiap tahapan adalah selama satu tahun. Prinsip Pengembangan model desa mandiri pangan (Naiggolan, 2007) yaitu: 1) Kemampuan pengelolaan ketahanan pangan di tingkat desa. 2) Kemampuan upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan pangan. 3) Kemampuan menangani masalah kelebihan atau kekurangan pangan dan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pangan. 4) Prinsip-prinsip pemberdayaan ketahanan pangan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi terus menggalakkan sektor pertanian karena menjadi komponen yang sangat vital dalam menjaga ketahanan pangan. Berita dari (goriau.com) Petani di Kenegerian Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mengeluhkan serangan hama pianggang terhadap sawahnya. "Kemaren kemarau panjang, setelah padi berbuah, pianggang lagi yang menyerang," ujar Darisa, seorang petani yang memasuki usia senja kepada GoRiau.com, Minggu (26/2/2021) pagi di Benai. Berdasarkan berita diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih kurang dari segi ilmu dan pengetahuan untuk dapat menghasilkan produksi pertanian yang bagus, karena untuk mengatasi hama saja petani tidak mengetahui obat untuk membasminya, ini akan menyebabkan rendahnya produksi pertanian yang dihasilkan, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan para petani. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani adalah salah satu bentuk memberdayakan petani untuk menjadi petani yang kuat, mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat petani adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan melakukan usaha secara berkelanjutan.

Selain permasalahan yang dihadapi petani di Kecamatan Benai terkait hama yang mengganggu padi, terdapat juga permasalahan sosial lainnya yang dihadapi para petani di Kecamatan, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salahsatu petani yang ada di Kecamatan Benai, dimana mengalami penurunan hasil panen terutama tanaman padi yang menjadi komoditi dari kelompok tani di Kecamatan Benai disaat musim hujan. Kelompok tani yang memiliki komoditas tentu tidak akan pernah luput dari peran pemerintah daerah, terutama yang berada di tingkat kecamatan yaitu Balai Penyuluh Pertanian. Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani dengan menyiapkan penyuluh Pertanian atau sering di sebut dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Penyuluhan dan latihan juga kurang dilakukan kepada petani/ kelompok tani hal ini juga disebabkan kelompok tani juga kurang aktif dalam menjalankan kegiatan atau fungsinya, sehingga membuat jarang dilakukannya penyuluhan ataupun temu lapangan yang dilakukan oleh penyuluh. Dari segi sarana BPP Kecamatan Benai belum mendukung untuk kegiatan penyuluhan kepada seluruh kelompok tani karena tidak memiliki aula jika dilakukan penyuluhan kepada seluruh kelompok tani yang ada di Kecamatan Benai, karena BPP Kecamatan Benai juga tidak memiliki gedung sendiri dan masih sewa.

Proses penetapan lokasi dan tahapan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan masih bersifat *top-down*. Artinya Program ketahanan pangan di kecamatan benai, Kabupaten Kuantan Singingi berasal dari pemerintah, sedangkan partisipasi masyarakat sebagai masukan untuk mendapatkan dukungan

pelibatan masyarakat belum sepenuhnya muncul. Dalam hal ini masyarakat setempat belum secara maksimal diperhatikan dalam penetapan lokasi dan operasional pelaksanaan Program ketahanan pangan di kecamatan benai. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian mengenai Implementasi kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi untuk optimalisasi pengelolaan ketahanan pangan masyarakat di kecamatan benai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah informan tersebut adalah sebagai berikut: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Almadi SH, MH; Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Benai Marlina SP; Staff Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Benai Armis SP; Ketua kelompok tani Indra Winnora A. md; Petani padi di Kecamatan Benai Sarwono. Teknik Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode Wawancara, Observasi, Studi dokumen. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain sebagai berikut: Pengumpulan data (*data collection*); Reduksi data (*data reduction*); Penyajian data (*display data*); Penarikan kesimpulan (*conclusion/vervication*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Kabupaten Kuantan Singingi Komunikasi**

Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Selain itu juga menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan agar penyampaian informasi dapat disampaikan dengan baik sehingga mudah dipahami. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Almadi SH, MH yang menyatakan bahwa:

*“Perencanaan pengelolaan tanaman pangan terutama padi sudah kita buat dengan baik. Beberapa sosialisasi dan penyuluhan sudah kita lakukan kepada para petani namun masih belum semua petani padi yang mendapatkannya karena kita masih terbatasnya anggaran dan kemampuan pegawai kita. Balai penyuluhan pertanian di kecamatan juga kita berkomunikasi mengenai penyampaian informasi terbaru tentang pengolahan tanaman padi. Luasnya wilayah lahan pertanian padi membuat pemerintah sedikit kualahan dalam mengkoordinir pemanfaatannya. Sebenarnya lahan pertanian khususnya tanaman padi memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa dijadikan sumber penghasilan daerah dalam ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi”.*

Berdasarkan pernyataan diatas di dapatkan bahwa pembuatan perencanaan ketahanan pangan di tingkat kabupaten kuantan singingi sudah di buat dengan kondisi daerah. Penyampaian informasi terbaru kepada para petani padi sudah dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan. Namun kegiatan ini belum mampu memberikan efek yang bagus kepada petani karena belum semua wilayah mampu dilaksanakan. Luasnya wilayah pertanian padi di kabupaten kuantan singingi membuat kegiatan ini sedikit terkendala. Kebanyakan hanya kecamatan tertentu saja yang sering mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan langsung dari pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi. Tentu saja kondisi seperti ini membuat petani yang tidak mendapatkan informasi hanya mengandalkan potensi dan kemampuan yang sebelumnya sudah dimiliki.

Penggunaan teknologi pertanian dalam mengelola hasil pertanian padi sangat memberikan dampak yang bagus demi meningkatkan hasil panen. kondisi petani padi di kecamatan benai kebanyakan sudah memiliki usia yang tidak produktif oleh karena itu pembaharuan metode pertanian dan pemberian informasi tata cara pertanian kepada masyarakat dengan usia produktif sangat dibutuhkan agar pengelolaan

pertanian mampu dimanfaatkan dengan penguasaan teknologi. implementasi kebijakan pengolahan ketahanan pangan belum sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi. Masih banyak perbaikan terhadap pelaksanaan program di lapangan dan juga metode penyampaian informasi yang perlu di tingkatkan keefektifannya.

Kemudian juga peneliti melakukan wawancara dengan staff balai penyuluhan pertanian kecamatan benai yang bernama Armis, Sp yang menyatakan bahwa:

*“Balai penyuluhan pertanian kecamatan benai sudah melakukan penyuluhan kepada petani padi yang ada di kecamatan benai dengan mengundang perwakilan-perwakilan dari setiap desa dan kelompok tani. Penyuluhan ini dilakukan guna untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi petani dalam mengolah tanaman padi sehingga dapat meningkatkan hasil panen”.*

Dari hasil wawancara di atas didapatkan bahwa balai penyuluh pertanian kecamatan benai telah melakukan penyuluhan mengenai pengolahan tanaman padi yang efektif sehingga dapat meningkatkan hasil panen. kegiatan ini dilakukan dengan mengundang perwakilan setiap desa dan kelompok tani padi kecamatan benai demi memberikan informasi terbaru mengenai pengolahan tanaman padi dan cara-cara mengatasi kendala yang menghambat produksi tanaman padi. Namun hasil dari penyuluhan ini tidak semua petani padi mendapat informasi tersebut karena hasil dari penyuluhan tidak disampaikan secara merata oleh setiap perwakilan yang sudah di undang. Banyaknya petani dan cukup luasnya wilayah juga menjadi faktor hasil penyuluhan ini tidak dapat dirasakan oleh semua petani padi di kecamatan benai. Selain itu juga kurang efektif karena tidak adanya keberlanjutan dan pengawasan secara berkala dari pihak balai penyuluhan pertanian kecamatan benai dalam memberikan bimbingan terhadap petani. Keterbatasan kemampuan dari pegawai balai penyuluhan pertanian juga menjadi kendala saat memberikan penyuluhan kepada petani padi.

Ketua Kelompok Tani Indra Winnora A. Md juga menyebutkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan tanaman padi juga belum berjalan dengan baik karena banyaknya kendala yang di hadapi oleh petani. Beliau menyatakan bahwa:

*“Saya salah satu ketua kelompok tani di kecamatan benai merasa program implementasi kebijakan ketahanan pangan tanaman padi masih belum baik karena masih banyak petani yang mengalami kendala ketika mengolah pertanian padi. Mulai dari pengolahan pemilihan bibit padi sampai dengan pengolahan hasil panen masih menggunakan pengetahuan yang sudah lama yang didapat dari belajar mulut kemulut secara tradisional. Arti pentingnya perubahan dan penggunaan teknologi hasil pertanian harus diberikan pengetahuannya kepada setiap petani agar dapat memberikan peningkatan hasil panen setiap tahunnya. Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan seperti melakukan pelatihan-pelatihan kepada setiap petani padi agar mampu mendukung program pemerintah dalam meningkatkan sumber ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi”.*

Pernyataan di atas memberikan informasi bahwa belum meratanya pelaksanaan implementasi kebijakan ketahanan pangan tanaman padi di kecamatan benai. Banyaknya kendala yang di hadapi petani padi ketika mengolah lahan membuat tingkat hasil panen tidak begitu mendapatkan hasil yang sesuai dengan program ketahanan pangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan koordinator balai penyuluh pertanian kecamatan benai yang menyatakan bahwa:

*“Kami sebagai penyuluh pertanian di kecamatan telah melakukan upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan pertanian khususnya pada tanaman padi. Kami telah melakukan beberapa kali penyuluhan mengenai bibit unggul dan cara pengolahan-*

*nya kepada kelompok tani serta masyarakat. Penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan mampu membantu dalam bertani padi sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Namun ketika kami melakukan penyuluhan hanya sedikit masyarakat yang ikut berpartisipasi, akibatnya adalah informasi yang terbaru mengenai cara pengolahan tanaman padi tidak didapatkan oleh semua petani padi yang ada di kecamatan benai. Para petani lebih percaya pada ilmu yang telah mereka pelajari secara turun temurun”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan bahwa Badan penyuluh pertanian kecamatan benai sudah melakukan penyuluhan kepada para petani padi. Kegiatan ini dilakukan agar petani padi mampu mendapatkan informasi terbaru mengenai cara pengolahan dan perawatan sehingga mampu meningkatkan hasil panen. Namun pada kenyataannya dilapangan bahwa masih sedikit petani yang mau mengikuti penyuluhan. Mereka beranggapan bahwa ilmu yang telah diajarkan secara turun temurun lebih mereka yakini dari pada pengetahuan yang diberikan oleh penyuluh. Mereka telah bertani secara bertahun-tahun dengan metode yang telah dipakai sejak dahulu. Hal ini membuat kurangnya minat petani untuk mengikuti penyuluhan yang di berikan oleh badan penyuluh pertanian kecamatan benai.

Kemudian juga peneliti melakukan wawancara dengan petani yang bernama sarwono yang menyatakan bahwa:

*“Kurangnya minat petani dalam mengikuti penyuluhan yaitu disebabkan karena mereka berfikir bahwa penyuluhan yang diberikan akan membuang waktu dan ilmu yang disampaikan mereka tidak terlalu memahami dengan baik karena kebanyakan yang mengikuti penyuluhan sudah berumur di atas 45 tahun yang daya tangkap terhadap pengetahuan baru sudah tidak bagus lagi. Petani mengikuti penyuluhan pada pagi hari kemudian ilmu yang di sampaikan keesokan harinya sudah lupa. Hal ini juga membuat*

*minat petani untuk memilih tidak ikut dalam penyuluhan yang diberikan”.*

Pernyataan diatas menyebutkan bahwa kebanyakan petani padi tidak mau mengikuti penyuluhan karena mereka beranggapan bahwa kegiatan tersebut hanya membuang waktu lebih baik menggunakan waktu tersebut untuk kegiatan bertani. Mereka juga beralasan bahwa ilmu yang diberikan ketika penyuluhan sulit dimengerti karena petani ketika mengikuti penyuluhan tidak menulis informasi yang disampaikan sehingga ilmu yang diberikan tidak terekam dengan baik. Daya ingat yang sudah berkurang juga menjadi alasan petani untuk tidak mengikuti penyuluhan. Usia petani yang mengikuti penyuluhan rata-rata di atas 45 tahun dan juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah hanya tamatan SD dan bahkan ada yang tidak tamat sekolah. Hal ini lah yang membuat penyampaian informasi dari badan penyuluh pertanian kecamatan benai tidak tersampaikan dengan baik kepada para petani padi. Komunikasi yang baik antara badan penyuluh pertanian kecamatan benai dengan para petani padi merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian suatu informasi. Partisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan pertemuan yang dilakukan penyuluh partisipasi anggota kelompok tani masih rendah, sehingga informasi tidak tersampaikan secara keseluruhan kepada anggota maupun petani.

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai agar dapat melakukan koordinasi dengan unsur-unsur terkait, seperti Camat, Kepala Desa, Kelompok Tani maupun Gapoktan, agar kegiatan pembangunan pertanian di Kecamatan Benai dapat menunjukkan kemajuan. Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan benai diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap kelompok tani, agar kelompok tetap berjalan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara diatas didapatkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di kecamatan benai masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan teori yang Edward III yang menyebutkan bahwa

### Sumber daya

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sumberdaya merupakan hal yang penting diperlukan pada sebuah kebijakan meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Peneliti sudah melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Almadi Sh, Mh yang menyatakan bahwa:

*“Implementasi kebijakan ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya pendukung lainnya. Pembinaan sumber daya manusia yang baik akan mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan pengolahan ketahanan pangan. Pengelolaan sumber daya yang baik memberikan hasil yang baik juga. Namun kita belum memiliki tenaga sumber daya manusia yang cukup untuk bisa melakukan pengelolaan ketahanan pangan tanaman padi di wilayah kabupaten kuantan singingi. Kemudian juga keterbatasan sumber daya berupa fasilitas pertanian yang belum bisa kita berikan kepada setiap lahan pertanian padi. Baru beberapa wilayah saja yang mampu kita berikan fasilitas bantuan berupa alat dan mesin pertanian”.*

Penjelasan dari hasil wawancara di atas bahwa sumber daya dalam pengolahan program ketahanan pangan masih mengalami keterbatasan. Baik itu berupa sumber daya manusia maupun sumber daya berupa fasilitas pendukung. Belum semua wilayah yang mampu di berikan pemerintah untuk mampu menunjang pengolahan lahan pertanian padi. Di Kecamatan benai sudah ada beberapa bantuan yang telah diberikan pemerintah

berupa pembuatan saluran irigasi kedalam lahan persawahan petani. Program ini sudah berjalan beberapa tahun dan namun masih belum semua lahan persawahan yang mampu di aliri dengan sistem irigasi bendungan. Banyaknya lahan dan jarak yang cukup luas membuat program ini harus dilaksanakan secara bertahap sehingga daerah lain bisa menikmati bantuan dari pemerintah.

Sumber daya Manusia, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Benai masih kekurangan penyuluh, dan usia para anggota kelompok tani di Kecamatan Benai sudah memasuki usia tidak produktif lagi sehingga daya serap anggota rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai Marlina SP yang menyatakan bahwa:

*“Sumber daya kita masih belum cukup memadai untuk melakukan semua program yang telah di rencanakan. Keterbatasan kemampuan dan kurang meratanya keahlian dari setiap penyuluh membuat program yang telah ditargetkan belum berjalan maksimal. Penambahan jumlah staf dan pelaksana saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi sebuah kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan sumber daya manusia dengan keahlian dan kemampuan yang kompeten”.*

Selain sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan juga perlunya sebuah fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting mendukung tercapainya implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki sumber daya manusia yang mencukupi, kompeten tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani di kecamatan benai yang bernama Indra Winnora A. Md yang menyatakan bahwa:

*“Pengelolaan lahan pertanian padi yang luas di wilayah kecamatan benai belum sepenuhnya mampu di lakukan oleh masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi salah satu alasan tidak*

*maksimalnya pengelolaan lahan. Masih banyak potensi lahan yang belum mampu di manfaatkan sehingga hasil produksi padi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan pribadi petani. Seharusnya hasil pertanian padi mampu meningkatkan nilai ketahanan pangan di kabupaten kuantan singingi khususnya di kecamatan benai. Kemudian juga keterbatasan alat dan mesin yang membuat pengolahan lahan tidak maksimal. Pengolahan lahan menggunakan mesin hanya bisa dilakukan oleh sebagian kecil petani padi dan masih banyak petani yang belum menggunakan teknologi pertanian dalam pengolahan lahan”.*

Hasil wawancara di atas di dapatkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam meningkatkan hasil ketahanan pangan tanaman padi di kecamatan benai. Pengolahan lahan pertanian padi kebanyakan hanya di kerjakan oleh petani yang sudah berusia lanjut. Sedangkan sumber daya yang berusia masih produktif tidak begitu tertarik untuk mengolah lahan pertanian padi. Keterbatasan ini tentu saja mempengaruhi hasil upaya peningkatan ketahanan pangan tanaman padi di Kecamatan Benai. Kemudian juga terbatasnya sumber daya pendukung berupa fasilitas pengolahan pertanian yang membuat generasi muda tidak mau terlibat dalam upaya peningkatan program hasil ketahanan pangan tanaman padi. Untuk ketua kelompok tani, gapoktan dan pengurus-pengurus lainnya agar berperan aktif untuk meningkatkan keaktifan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya, dan lebih meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian maupun kelompok tani.

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara dengan informan di atas maka didapatkan hasil bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di kecamatan benai masih tergolong kecil. Hal ini sesuai dengan teori dari Edward III yang menyebutkan bahwa sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya bukan hanya yang berhubungan dengan sumber daya manusia namun juga

berhubungan dengan informasi, wewenang, serta fasilitas fisik maupun non fisik. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten tetapi jika tidak didukung dengan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### **Disposisi/Sikap Pelaksana**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Almadi SH, MH yang menyatakan bahwa:

*“Peraturan pemerintah mengenai pengelolaan peningkatan ketahanan pangan sudah dibuatkan sebagai sebuah peraturan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten kuantan singingi memiliki perhatian terhadap ketahanan pangan di kabupaten kuantan singingi. Namun pada pelaksanaannya terdapat keterlambatan pelaksanaan kebijakan disebabkan karena disposisi dari beberapa level badan pemerintahan yang mengharuskan melalui tahap-tahap yang telah diatur. Adanya proses ini menjadi salah satu lambatnya eksekusi kebijakan di level pelaksana pada petani”.*

Berdasarkan pernyataan tersebut didapatkan bahwa banyaknya tahapan yang perlu dilalui sehingga bisa di disposisi menjadi suatu kebijakan yang bisa dilaksanakan oleh pelaksana dilapangan cukup banyak. Hal ini membuat terlambatnya pelaksanaan implementasi kebijakan dan menyebabkan kurang efektifnya ketika

pelaksanaan. Kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan ketahanan pangan di kecamatan benai. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif dukungan terhadap implementasi kebijakan maka kemungkinan besar implementasi akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan ketahanan pangan akan menghadapi kendala yang serius.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Benai Marlina SP yang menyatakan bahwa:

*“Pelaksanaan implementasi kebijakan ketahanan pangan di kecamatan benai masih terfokus pada peraturan dan tahap-tahap birokrasi yang mendisposisikan sebuah kebijakan dari atas hingga ke level bawah ke balai penyuluh pertanian. banyaknya tahapan persetujuan dari masing-masing jenjang pemerintahan membuat kita sebagai penyuluh kadang merasa ragu untuk melakukan penyuluhan dari sebuah kebijakan baru. Terkadang informasi yang diterima tidak sampai secara menyeluruh sehingga pada jenjang paling bawah tidak memahami dengan baik apa sebenarnya maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut”.*

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan ketahanan pangan apabila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan Untuk Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih memberikan pengawasan

kepada BPP yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, kemudian memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan yang mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Upaya menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

### **Struktur birokrasi**

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Almadi SH, MH menyatakan bahwa:

*“Pemerintah kabupaten kuantan singingi telah membentuk struktur organisasi dalam bidang pertanian mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan dan desa. Hal ini diharapkan mampu mengatasi masalah pertanian khususnya pada tanaman padi yang menjadi sumber tanaman*

*pangan utama masyarakat. Pembentukan birokrasi ini agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pengetahuan terbaru mengenai pengolahan tanaman padi. Selain itu juga pemberian tanggung jawab ke pada setiap balai penyuluh pertanian kecamatan sangat memerlukan koordinasi yang baik dan berkelanjutan agar program implementasi kebijakan ketahanan pangan tanaman padi dapat terlaksana dengan baik”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas didapatkan bahwa pemerinpah telah membentuk struktur organisasi dalam pengolahan pertanian mulai dari tingkat kabupaten sampai ke level masyarakat yang di koordinasi oleh balai penyuluh pertanian di masing-masing kecamatan. Pemerintah kabupaten kuantan singingi juga telah mengeluarkan peraturan demi menjaga keteraturan proses pengolahan tanaman pangan khususnya tanaman padi. Perhatian khusus dari pemerintah belum sepenuhnya mampu diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Masih ada program-program yang belum terlaksana sehingga implementasi peraturan mengenai ketahanan pangan tanaman padi tidak berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan pemerintah ini harus didukung dengan fasilitas yang memadai dan anggaran yang cukup sehingga petani mampu mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap program yang dibuat.

Pemberian tanggung jawab kepada suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan.

Pernyataan lain juga disebutkan oleh Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai Marlina SP yang menyebutkan bahwa :

*“Proses penyuluhan pertanian mengenai tanaman padi telah kami berikan kepada masyarakat. Namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya fasilitas sarana dan pra sarana ketika memberikan penyuluhan kepada para petani. Kami berharap selaku penyuluh pertanian agar pemerintah kabupaten untuk menetapkan anggaran yang jelas sehingga mampu membantu penyuluh dalam memberikan informasi kepada petani”.*

Hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa balai penyuluh pertanian kecamatan benai masih mengalami kendala ketika memberikan penyuluhan. Kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah membuat proses penyuluhan hanya dilakukan dengan fasilitas yang seadanya. Kegiatan penyuluhan sering dilakukan di aula kantor camat dengan mengundang petani dan kelompok-kelompok tani. Tingkat kehadiran dari setiap perwakilan juga masih kecil karena disebabkan jarak yang ditempuh bagi beberapa desa cukup jauh sehingga membuat petani tidak menghadiri penyuluhan. Selain itu juga kurangnya minat petani dan kelompok tani untuk mengikuti penyuluhan juga karena merasa bosan atas penyampaian dari penyuluh yang hanya memberikan penjelasan yang lebih banyak memberikan teori bukan praktek langsung ke lapangan. Kondisi ini membuat implementasi kebijakan ketahanan pangan khususnya tanaman padi tidak berjalan dengan baik.

Kemudia juga peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang petani padi yang bernama sarwono menyebutkan bahwa:

*“Kami para petani padi menginginkan adanya kejelasan pasti dari kebijakan pemerintah mengenai peningkatan hasil tanaman pangan padi. Sehingga kami dapat terbantu ketika mengolah lahan pertanian. Pemerataan pemberian bantuan alat pertanian juga harus di perhatikan pemerintah bukan hanya sekedar syarat bahwa penerapan kebijakan telah dilaksanakan. Adanya kebijakan baru membuat perubahan cara dan terget pencapaian dari pemerintah.”*

Dari hasil tersebut didapatkan bahwa para petani tidak terlahu memahami bagaimana implementasi kebijakan ketahanan pangan yang harus mereka lakukan. Karena tidak adanya penyampaian rencana program kebijakan tentang ketahanan pangan secara langsung mampu untuk dipahami oleh petani. Hanya sebagian khalangan saja yang mendapatkan informasi tersebut. Ketidakjelasan dari setiap kebijakan yang dibuat menjadikan kurang bersinerginya antara petani dengan target pencapaian implementasi kebijakan ketahanan pangan. Seharusnya pemerintah lebih memberikan kejelasan terhadap tujuan dan tata cara *standard operational procedure* (SOP) yang mudah dipahami oleh petani sebagai sasaran kebijakan agar bisa hasinya sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan hasil ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan maka didapatkan hasil bahwa birokrasi dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di kecamatan benai masih belum baik karena masih banyak petani yang belum memahami dengan jelas tentang tujuan dari kebijakan yang dibuat pemerintah. kemudian juga kurangnya pemerataan tindakan dari pemerintah dalam hal memberikan standar dalam mengelola lahan pertanian padi. Hal tersebut membuat kurangnya sinergi antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan pengelolaan ketahanan pangan yang dilakukan oleh petani padi. Hasil ini juga didukung dengan teori Edward III yang menjelaskan bahwa ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

### **Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Kuantan Singingi**

#### **Kurangnya fasilitas sarana dan pra sarana**

Pentingnya fasilitas untuk mendukung terlaksananya implementasi kebijakan ketahanan pangan tanaman padi di kecamatan benai menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah. kualitas dan kuantitas hasil panen secara langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh. Ketersediaan sarana yang baik ditingkat pemerintah sebagai fasilitator sampai dengan

petani sebagai implementor harus terpenuhi demi mencapai hasil kebijakan ketahanan pangan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan selaku koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Benai Marlena SP yang menyatakan bahwa:

*“Balai penyuluhan pertanian kecamatan benai belum memiliki fasilitas pendukung yang baik dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan tanaman padi. Keterbatasan sarana dan prasarana penelitian dan praktek membuat pelaksanaan kebijakan ini hanya dilakukan dengan kemampuan seadanya. Kami sangat berharap sebagai penyuluh pertanian mampu memiliki kualitas fasilitas yang baik sehingga mampu menunjang ketika melakukan penyuluhan kepada para petani. Selain itu juga bantuan fasilitas langsung berupa mesin pengolahan lahan dan hasil panen juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh petani padi. Adanya bantuan tersebut tentu akan lebih memberikan kemudahan dalam pengolahan pertanian padi dan akan berpengaruh pada hasil panen yang lebih baik”*

Berdasarkan pernyataan di atas didapatkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan tanaman padi di kecamatan benai masih belum memiliki fasilitas yang memadai. Hal ini terbukti dengan adanya petani yang mengalami keterlambatan masa tanam maupun panen yang disebabkan dengan kurangnya alat dan mesin pengolahan. Hal ini tentu berdampak pada tingkat panen yang kurang maksimal. Masih terbatasnya wilayah pertanian yang di aliri irigasi perairan membuat petani kadang mengalami gagal panen ataupun hasil panen yang kurang bagus kualitas padinya karena kekurangan perairan. Berbagai fasilitas tersebut menjadi faktor penentu bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan baik atau tidak bisa dilihat dari kondisi hasil panen petani padi. Meskipun sumber daya manusia yang mengelolanya baik namun tidak di dukung dengan fasilitas yang baik maka hal ini akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap implementasi kebijakan ketahanan pangan tanaman padi di kabupten kuantan singingi. Kemudian peneliti juga mewawancarai ketua Kelompok Tani Indra Winnora A. Md beliau menyatakan bahwa:

*“Keterbatasan fasilitas bagi petani membuat hasil panen hanya tetap pada angka yang hampir sama setiap tahunnya. Adanya kebijakan tentang ketahanan pangan seharusnya mampu memberikan pengaruh yang baik bagi petani sehingga akan berdampak pada hasil panen yang meningkat. Oleh karena itu keberhasilan terhadap implementasi kebijakan ketahanan pangan akan dinilai berhasil. Namun pada kenyataannya masih belum tercapai hal yang diinginkan sesuai dengan isi tentang kebijakan ketahanan pangan yang telah dibuat pemerintah. selain itu juga kami selaku petani juga mengharapkan kepada penyuluh di kecamatan agar memberikan percontohan yang dibuktikan langsung dengan adanya lahan percobaan pertanian sehingga petani dapat langsung mengamati. Luasnya wilayah lahan pertanian padi di kecamatan benai mengharuskan penyuluh pertanian kecamatan benai mampu memberikan kesamaan informasi yang jelas, terarah dan berkelanjutan”.*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Balai penyuluh pertanian kecamatan benai belum memiliki sarana dan prasarana yang baik sehingga belum mampu maksimal ketika memberikan penyuluhan kepada petani dan masyarakat umum. Tidak sesuainya luas daerah yang harus dioordinir oleh penyuluh dengan sarana yang dimiliki membuat hanya sebagian tempat tidak mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan standar yang sudah dibuat didalam kebijakan pengelolaan ketahanan pangan. Mengimplementasikan sebuah kebijakan sangat membutuhkan banyak faktor pendukung sehingga setiap elemen mampu saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peran penting pemerintah dan unsur-unsur terkait juga akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan ketahanan pangan di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi.

### **Kurangnya anggaran**

Anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara jelas dan selaras dalam mencapai target yang telah dibuat. Anggaran umumnya digunakan untuk mengetahui sebuah rencana dari awal yang akan dikeluarkan untuk

pembelian maupun biaya pada proyek atau program tertentu. Anggaran bisa dijadikan sebagai alat ukur pencapaian target sebuah kebijakan. Terpenuhinya sebuah kebijakan oleh anggaran akan sangat mempengaruhi pada hasil yang direncanakan. Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan didapatkan bahwa masih belum terpenuhinya anggaran implementasi kebijakan ketahanan pangan di kecamatan benai kabupaten kuantan singingi. Hasil ini didukung dengan wawancara peneliti dengan informan koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Benai Marlina SP yang menyatakan bahwa:

*“Kami sudah melakukan penyuluhan kepada petani, namun masih belum maksimal sesuai dengan sasaran yang telah dibuat pada peraturan yang dibuat pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena terbatasnya anggaran yang diberikan sehingga kami hanya memanfaatkan kemampuan dan fasilitas yang ada. Kita berharap pemerintah memberikan anggaran yang sesuai dengan tujuan program ketahanan pangan sehingga dapat menunjukkan hasil yang baik bagi pertumbuhan nilai ketahanan pangan tanaman padi”.*

Berdasarkan hasil pernyataan diatas dapat diketahui bahwa terbatasnya anggaran yang di berikan membuat terhambatnya pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan tanaman padi di kecamatan benai kabupaten kuantan singingi. Kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah memiliki tujuan agar adanya peningkatan hasil panen sehingga dapat membuat ketahanan pangan menjadi meningkat. Besarnya target pencapaian dari setiap kebijakan juga harus di dukung dengan anggaran yang sesuai agar para pelaksana mampu menjalankan program baik. Meskipun perencanaan sebuah kebijakan sudah di susun dengan sangat detail namun tanpa didukung dengan anggaran yang sesuai maka hal tersebut tidak akan bisa berjalan seperti target yang diinginkan.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua Kelompok Tani Indra Winnora A. Md beliau menyatakan bahwa:

“Dana atau biaya dalam pelaksanaan kegiatan baik penyuluhan, pertemuan dalam penyusunan program maupun pembuatan percontohan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai masih keterbatasan dana. Untuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih memperhatikan dana untuk kegiatan penyuluhan di tingkat Kecamatan, dengan menyediakan Dana khusus untuk kegiatan penyuluhan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa terbatasnya anggaran yang dimiliki Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai dalam penyusunan program. Kegiatan yang dibuat penyuluh sedikit banyaknya membutuhkan anggaran apalagi dalam pelaksanaan pembuatan percontohan pertanian. tentu saja program ini sangat membutuhkan banyak anggaran agar dapat dilaksanakan dan di praktekkan langsung oleh petani. Pentingnya sebuah anggaran dalam mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah agar para petani mendapatkan hasil seperti yang direncanakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Tanaman Padi Di Kecamatan Benai masih belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan komunikasi antara implementor dengan pembuat kebijakan masih belum dirasakan oleh semua petani padi, kemudian Sumber daya yang dimiliki baik berupa sumber daya manusia dan sumber daya pendukung berupa fasilitas juga belum terpenuhi dengan baik, selanjutnya Disposisi/sikap pelaksana juga belum maksimal dan lambatnya proses penurunan disposisi sebuah kebijakan, terakhir yaitu struktur birokrasi yang membuat banyaknya tahapan yang harus dilalui hingga sampai ke tahap pelaksanaan dilapangan oleh petani.

Faktor yang menghambat implementasi kebijakan ketahanan pangan tanaman padi di kecamatan benai yaitu kurangnya fasilitas Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai, kemudian juga kurangnya anggaran yang diberikan

pemerintah untuk mendukung terlaksananya kebijakan ketahanan pangan tanaman padi di Kecamatan Benai seperti pelaksanaan kegiatan baik penyuluhan, pertemuan dalam penyusunan program maupun pembuatan percontohan.

Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi lebih memperhatikan dana untuk kegiatan penyuluhan di tingkat Kecamatan, dengan menyediakan Dana khusus untuk kegiatan penyuluhan.

Disarankan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih memberikan pengawasan kepada BPP yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

Disarankan kepada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Benai agar dapat melakukan koordinasi dengan unsur-unsur terkait dengan BPP, seperti Camat, Kepala Desa, Kelompok Tani maupun Gapoktan, agar kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Kecamatan Benai dapat menunjukkan kemajuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, edisi revisi.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah Dan Pembangunan*. Jawa Barat :UNPAD Press
- Natasya Yaumul Haqqie, Shahnaz. 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan*.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

- Sukino. 2018. *Membangun Pertanian Dengan Memberdayakan Masyarakat Tani*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Usman, Husaini. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, cet.4, ed.2.
- Baiq Rani Dewi Wulandari, wiwin anggraini, 2020, *Food estate sebagai ketahanan pangan di tengah pandemi covid-19 di desa wanasaba. Vol 4 no 1. P-issn.2614-5251.e-issn.2614-526x*
- Encang saepudin, ninis agustini, 2018, *Partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan di Kabupaten Bandung. Hal 86-94. vol 20 no 1 jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora*.
- Hasan, Thoha (2014) *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Pendanaan Dan Kualitas Aparatur Terhadap Keberhasilan Pelayanan Pendidikan Di Kabupaten Karawang*. Jurnal Unsika. ISSN. 1412-86676. Vol. 10 No.22.
- Kurnia siti afifah, sri wibawani, 2019, *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lumbung pangan "sumber makmur"*
- Kholid, hardiansyah dan M.D Djamaludin, *Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan lumbung pangan di Kabupaten Lampung Barat*
- Maisur, & Ramziah. 2019. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Terhadap Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie*. Jurnal Sains Riset, 9(3), 1–8. <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR/article/view/156/151>.
- Melinda ratna putri dan M. Farid Ma'ruf, *Partisipasi masyarakat dalam program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di desa seban*
- M. Chairul Basrun, 2018. *Ketahanan pangan lokal dan diversifikasi konsumsi masyarakat*
- Mustanir, A., & Razak, M. R. R. 2017. *Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan*. Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi uhammadiah Aisyiyah (APPPTMA), 1–7.
- Tobias saroy, 2021, *Partisipasi masyarakat dalam penanganan program pangan (studi saat menghadapi pandemi covid-19). Vol.14 no 1*
- Bahua, Mohamad Ikbal. 2015. *Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Gorontalo : Ideas Publishing.